



► PROGRAM PENINGKATAN GIZI

MBG di Kemantren Kotagede Mandek

UMBULHARJO—Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, mengaku segera berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait terhentinya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kemantren Kotagede.

*Harian Jogja
redaksi@harianjogja.com*

"Saya akan berkomunikasi dalam waktu dekat ini, agar program MBG tidak mandek," ujar Hasto, Minggu (4/5).

Ia menjelaskan, informasi mengenai terhentinya program MBG di Kotagede telah sampai kepadanya. Persoalan teknis di lapangan, menurut dia, saat ini tengah dikaji oleh Pemerintah Pusat atau Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana teknis program tersebut.

"Kemarin saya mendengar itu. Dan saya kira hal-hal yang teknis, sudah dikaji permasalahannya. MBG punya jalur vertikal ke Pusat, kemudian akhirnya nanti akan dikaji," katanya.

Program MBG merupakan inisiatif Pemerintah Pusat yang menyasar sejumlah sekolah, termasuk di Kota Jogja. Di wilayah Kotagede, pelaksanaannya dikoordinasikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, sejumlah sekolah di wilayah itu melaporkan distribusi makanan dari program tersebut terhenti sejak beberapa pekan terakhir.

Hasto memastikan selain berkoordinasi dengan pemerintah Pusat, ia juga telah meninjau langsung pelaksanaan program

► Di wilayah Kotagede, pelaksanaan MBG terhenti sejak beberapa pekan terakhir.

► Budi memperkirakan ada 2.500 hingga 3.000 siswa dari beberapa sekolah yang terdampak terhentinya layanan MBG.

MBG di beberapa sekolah penerima. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Jogja, Budi Santosa Asrori, membenarkan bahwa penghentian layanan MBG hanya terjadi di sekolah-sekolah yang berada dalam naungan SPPG Kemantren Kotagede.

Namun, ia tidak menjelaskan secara pasti penyebab penghentian tersebut.

Budi memperkirakan ada sekitar 2.500 hingga 3.000 siswa dari beberapa sekolah yang terdampak akibat terhentinya layanan MBG di wilayah tersebut.

Menurut dia, Pemkot tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan MBG karena program itu sepenuhnya berada di bawah kendali Badan Gizi Nasional.

"Bukan kewenangan Pemkot Jogja, kewenangan [program MBG] ada di Badan Gizi Nasional," ujar Budi.

Ia menambahkan, Pemkot hanya berperan dalam pendataan sasaran program, seperti sekolah mana saja yang menerima bantuan serta jumlah muridnya. Selebihnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. "Kalau kami itu kan sebenarnya hanya banyak pada aspek data yang disampaikan, sekolah-sekolah mana yang akan menjadi sasaran, jumlah muridnya berapa. Kalau aspek yang lain kan bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah," ujarnya. (Antara)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005